

## Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri

Yulinartati , Ni Nyoman Putu Martini G

Univeritas Muhammadiyah Jember

e-mail: \*[yulinartati@unmuhjember.ac.id](mailto:yulinartati@unmuhjember.ac.id), [ninyomanputu@unmuhjember.ac.id](mailto:ninyomanputu@unmuhjember.ac.id)

Diterima : Agustus 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

### ABSTRAK

Dengan Diterbitkannya Undang-undang yang menawarkan kekuasaan kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan perekonomian desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada maka pemerintah desa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun kenyataannya tidak sedikit desa yang gagal menjalankan usahanya dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes tersebut. Oleh karena itu dirasa perlu adanya pendampingan pengelolaan BUMDes khususnya di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam upaya optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Desa Mandiri.

**Kata Kunci:** BumDes, pembangunan desa mandiri, tata kelola, ekonomi kelembagaan

### ABSTRACT

*With the issuance of a law that gives authority to the village government in order to improve the welfare of the village community. Especially in rural areas by optimizing existing resources, the village government needs to form a village-owned enterprise but in reality, there are not a few villages that fail to run their businesses due to the lack of human resources in managing the village-owned enterprises. Therefore, it's felt that there is a need for assistance in the management of village-owned enterprises, especially in the Sukorejo village, Bangsalsari Sub-district, Jember district in an effort to optimize village-owned enterprises towards an independent village*

**Keywords:** BUMDes, independent village development, governance, institutional economy

### PENDAHULUAN

Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 dalam rangka mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia salah satunya melalui pembangunan disegala bidang. Desa merupakan skala pemerintahan terkecil yang memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga berpengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016), namun seiring perkembangan jaman dari tahun ke tahun jumlah penduduk desa banyak yang melakukan urban di perkotaan, tahun 2020 ini diproyeksikan oleh Worldometers jumlah penduduk perkotaan akan semakin meningkat mencapai kira-kira 56,4%, kondisi ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh pedesaan yang luas wilayahnya berbanding terbalik dengan luas wilayah perkotaan belum tergarap dengan baik. Disisi lain situasi desa dianggap memiliki situasi yang esensial dalam kemajuan negara mengingat desa merupakan alasan untuk mengenali masalah-masalah kawasan lokal hingga penataan dan pengakuan destinasi negara di tingkat desa. (Sisik, 2015).

Terjadinya kesenjangan antara kota dan desa dalam segala bidang baik dari segi ekonomi, pendidikan, fasilitas-fasilitas dan kesejahteraan masyarakatnya yang mendorong masyarakat pedesaan untuk melakukan urbanisasi, hal inilah yang perlu diperhatikan agar pemerintah melakukan percepatan pembangunan di pedesaan, namun sebenarnya pembangunan di pedesaan selama ini sudah berjalan hanya masih banyak mengalami kegagalan-kegagalan hal ini dikarenakan banyaknya campur tangan pemerintah, yang berdampak pada terhambatnya inovasi dan kreativitas masyarakat wilayah desa setempat dalam administrasi perekonomian desa. Salah satu pendekatan untuk mendorong dan mempercepat perbaikan desa adalah bahwa pemerintah desa diberi kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk secara mandiri menangani lingkup desa melalui lembaga perekonomian di tingkat desa. (Budiono, 2015). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah yang menjelaskan bahwa desa dapat membangun usaha milik desa yang ditunjukkan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Kebutuhan dan kemampuan desa inilah yang menjadi alasan dibangunnya BUMDes. (Edy Yusuf, 2016). BUMDes merupakan modal sosial yang mencakup upaya untuk memperkuat perekonomian pedesaan dan dituntut untuk menjadi jawaban atas permasalahan perbaikan ekonomi pedesaan yang terus gagal karena terlalu besarnya intervensi pemerintah. Dengan demikian BUMDes merupakan unsur sah yang berdiri sendiri dari pemerintah desa dan bertujuan untuk membantu kebebasan moneter wilayah kota setempat dan penyelenggaraannya diselesaikan oleh pemerintah desa dan warga desa setempat. Penataan dan pengurus BUMDes sangat bergantung pada kemampuan administrasi kepala desa. Prestasi kepala desa dalam menggerakkan jiwa kekeluargaan dan peran serta daerah desanya dalam mengakui kebebasan desa melalui BUMDes adalah sebuah prestasi. (Nana Mulyana dkk, 2018). Kemajuan BUMDes harus dilakukan agar BUMDes saat ini dapat bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Tujuan serta sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes diawasi secara terkoordinasi dan ahli. BUMDes merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi di kota. (Edi Yusuf, 2016) BUMDes dituntut memiliki opsi untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian kota (Ramadana et al, 2013). Begitu pula dengan pendirian BUMDes di kota Sukorejo, Kabupaten Bangsalsari, Kabupaten Jember diperlukan untuk meningkatkan bantuan pemerintah daerah setempat.

### METODE PEIAKSANAAN

Dalam Pengabdian Masyarakat dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri, di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, metode pelaksanaan yang dipakai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Solusi	Luaran	Tahapan
Aspek Kelambagaan Sosialisasi yang tiada henti kepada masyarakat Desa Sukorejo sampai masyarakat mengetahui dan memahami serta sadar akan pentingnya partisipasi dalam program BUMDes dalam rangka peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat dan desa	Pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tentang pentingnya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat	Menentukan lokasi dan persiapan media yang akan digunakan Sosialisasi program kemitraan kepada mitra Pendidikan tentang BUMDes serta penyadaran akan pentingnya BUMDes.
Aspek Sumberdaya Perlunya pendidikan serta pelatihan manajemen BUMDes kepada masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari untuk meningkatkan kinerja agar usaha milik desa dapat semakin berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Diharapkan pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (sebagai wujud Tri Dharma) maupun Pemerintah khususnya Dipemdes.	Pengetahuan tentang manajemen BUMDes untuk meningkatkan kinerja agar usahanya semakin berkembang. Pendampingan untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen BUMDes Pendampingan untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi

Aspek Permodalan Selain mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, juga dilakukan penggalangan dana dari masyarakat untuk berinvestasi pada BUMDes tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah	Menyadarkan masyarakat untuk ikut memiliki BUMDes yang pada akhirnya mau menginvestasikan uangnya pada BUMDes serta pendampingan pembuatan proposal dalam pengajuan pinjaman dana kepada pihak ke-tiga	Penyadaran akan keikutsertaan kepemilikan dengan menanamkan investasi pada BUMDes Pendampingan pembuatan proposal untuk mengajukan pinjaman dana sebagai tambahan modal
---	--	--

## HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilaksanakan pada hari Senin, 15 Maret 2021. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan PKK Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari dengan Universitas Muhammadiyah Jember. Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, lancar dan adanya antusias dari para peserta sosialisasi dan pelatihan untuk mendengarkan materi dan mengikuti jalannya sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan pemateri. Antusiasme peserta nampak dari banyaknya pertanyaan yang terkait dengan pembentukan BUMDes, serta kemajuan dan perkembangan sampai pada untuk mendapatkan modal dari luar warga masyarakat desa atau pihak ketiga.

Secara keseluruhan dapat dikatakan acara berlangsung dengan tertib dan lancar. Seluruh peserta nampak antusias memperhatikan materi yang diberikan oleh pemateri dan banyak menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan BUMDes serta cara pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan ini, namun tidak semua pemateri mampu berbahasa daerah sekitar Desa Sukorejo, dikarenakan masyarakat sekitaran daerah Desa Sukorejo menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari tetapi masih mampu memahami jika orang lain menggunakan komunikasi dengan bahasa Indonesia, Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan adalah tempat pelatihan yang dilakukan di tempat terbuka membuat slide presentasi tidak dapat terlihat dengan jelas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) yang dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada suatu rintangan atau kendala yang berarti, dan peserta nampak antusias dengan pemaparan yang dilakukan oleh pemateri dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang disampaikan dan antusiasnya ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan BUMDes yang benar.

### Saran

#### a. Untuk mitra

Untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi, pendidikan dan pelatihan diharapkan anggota masyarakat dan ibu-ibu PKK Desa Sukorejo peserta sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat pada BUMDes yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

b. Untuk institusi pengusul

Melihat antusiasme peserta pelatihan, pengusul menganggap perlu dilakukan tindak lanjut untuk tetap melakukan pendampingan dan binaan kepada BUMDes Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari sampai organisasi tersebut sukses dan masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dengan hadirnya BUMDes.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Dwi Hadya Jayani, diunduh pada tanggal 12 November 2020 jam 22.01 Databoks
- Edy Yusuf Agunggunant Fitri Arianti dan Edi Wibowo Kushartono Darwanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Unisnu Jepara, Vol 13, 01 Maret 2016
- Gatot Murdjito, Metode Pengabdian Pada Masyarakat, 2012
- Nana Mulyana,, Anisa Utami & Simon Sumanjoyo Hutagalung *Prosiding Seminar Nasional Penerapan IPTEKS Politeknik Negeri Lampung 08 Oktober 2018 ISBN 978-602-5730-68-9 halaman 172-177* <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/SEMTEKS>
- Ramadana, C.B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068-1076.
- Sa'dullah. (2016). *Pentingnya Media Audio Visual dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Available: <http://www.kemendes.go.id/index.php/view/detil/1799/pentingnya-media-audio-visual-dalam-pengembangan-kawasan-perdesaan-agropolitan>. Accessed 18 July 2016.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115-131
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014.